

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN PRAMBON
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2020**



Disusun
Tahun 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN PRAMBON**

Jln. Diponegoro No. 120 Telp. (031) 8971008 Kode Pos 61264
Prambon – Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Prambon Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LAKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Prambon serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Prambon).

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LAKIP Kecamatan Prambon Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Prambon di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Prambon dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Demikian LAKIP Kecamatan Prambon dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Prambon, Maret 2021
CAMAT PRAMBON



RONNY YULIANOWARSO, A.P. M. HP

Pembina Tk. I
NIP. 19750709 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
a. Dasar Hukum	1
b. Tujuan Penyusunan	2
1.2. Gambaran Umum OPD	2
a. Struktur Organisasi	2
b. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Aspek Strategis OPD	8
a. Sumber Daya Aparatur	8
b. Aset Yang Dimiliki	11
c. Isu Strategis Yang Dihadapi	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2 Rencana Kerja Tahunan	23
2.3 Perjanjian Kinerja	31
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Capaian Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD	38
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	38
a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah	38
b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah	39
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	39
ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	41
iii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah .	42
iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	44

c.	Pengukuran Kinerja Tahunan.....	46
d.	Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan	46
i.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	46
ii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	49
iii.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah ...	51
iv.	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	53
3.3.	Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	55
a.	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan.....	55
b.	Solusi dan Upaya perbaikan di tahun mendatang	60
3.4.	Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung	60
3.5.	Laporan Realisasi Anggaran	76
3.6.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	79
3.7.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	80
a.	Evektivitas dan Efisiensi	80
b.	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.....	80
BAB IV : PENUTUP / SIMPULAN UMUM		81
LAMPIRAN : Penghargaan yang diperoleh (jika ada)		
PERNYATAAN TELAH DI REVIEW OLEH INSPEKTORAT		82
FORMULIR CHECK LIST REVIU		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Susunan Kepegawaian Kecamatan Prambon Tahun 2020.....	9
Tabel 1.2	Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 1.4	Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 1.5	Jumlah Sarana Yang Dimiliki.....	11
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Kecamatan Prambon.....	14
Tabel 2.2	Matriks Rencana Strategis Kecamatan Prambon Tahun 2016-2021	15
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Prambon Tahun 2020.....	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja OPD.....	31
Tabel 2.5	Anggaran Per Program / Kegiatan Tahun 2020.....	36
Tabel 3.1	Capaian Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD	38
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Prambon Tahun 2020.....	38
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	39
Tabel 3.4	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	41
Tabel 3.5	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah.....	42
Tabel 3.6	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	44
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Tahunan	46
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan Perbandingan antara capaian kinerja dengan target	46
Tabel 3.9	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	49
Tabel 3.10	Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah.....	51
Tabel 3.11	Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis	53
Tabel 3.12	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pengukuran Keberhasilan Kinerja Jangka Menengah	55
Tabel 3.13	Formulasi Capaian Indikator Kinerja OPD	57
Tabel 3.14	Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan OPD	58
Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung	60
Tabel 3.16	Perbandingan Capaian Program/Kegiatan Pendukung	66
Tabel 3.17	Laporan Realisasi Anggaran.....	76
Tabel 3.18	Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	79
Tabel 3.19	Efektifitas dan Efisiensi	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan antara capaian kinerja SKM Tahun 2020 dengan target.....	39
Grafik 3.2	Perbandingan antara capaian kinerja SAKIP Tahun 2020 dengan target	40
Grafik 3.3	Perbandingan antara capaian kinerja Nilai Rata-rata IDM Tahun 2020 dengan target	40
Grafik 3.4	Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya	41
Grafik 3.5	Perbandingan antara capaian indikator kinerja tujuan Nilai SKM Tahun 2020 dengan target jangka menengah	42
Grafik 3.6	Perbandingan antara capaian indikator kinerja tujuan Nilai SAKIP Tahun 2020 dengan target jangka menengah	43
Grafik 3.7	Perbandingan antara capaian indikator kinerja tujuan Nilai Rata-rata IDM Tahun 2020 dengan Target jangka menengah	43
Grafik 3.8	Perbandingan antara capaian kinerja tujuan Nilai SKM Tahun 2020 dengan instansi sejenis	44
Grafik 3.9	Perbandingan antara capaian kinerja tujuan Nilai SAKIP Tahun 2020 dengan instansi sejenis	45
Grafik 3.10	Perbandingan antara capaian kinerja tujuan Nilai Rata-rata IDM Tahun 2020 dengan Instansi sejenis	45
Grafik 3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai SKM dengan target.....	47
Grafik 3.12	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Umum dengan target	48
Grafik 3.13	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Desa Maju dengan target	48
Grafik 3.14	Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran SKM dengan tahun sebelumnya	49
Grafik 3.15	Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran urusan pemerintahan dengan tahun sebelumnya	50
Grafik 3.16	Perbandingan realisasi indikator kinerja sasaran Nilai IDM dengan tahun sebelumnya	50
Grafik 3.17	Perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran Nilai SKM Tahun 2020 dengan target jangka menengah	51
Grafik 3.18	Perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran urusan pemerintahan Tahun 2020 dengan target jangka menengah	52
Grafik 3.19	Perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran Nilai Rata-rata IDM Tahun 2020 dengan target jangka menengah	52
Grafik 3.20	Perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran Nilai SKM Tahun 2020 dengan instansi sejenis	53
Grafik 3.21	Perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tahun 2020 dengan instansi sejenis	54
Grafik 3.22	Perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran Nilai IDM Tahun 2020 dengan instansi sejenis	54

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bahan utama untuk memonitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2020, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah termasuk Kecamatan Prambon wajib menyusun LAKIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan program/kegiatan pada masing-masing OPD yang telah diselenggarakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Prambon.

Secara umum tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Prambon Tahun 2020 melalui indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan di dalam Renstras Tahun 2016-2021 dapat tercapai dengan cukup baik, dari 2 sasaran strategis yang mencakup 3 indikator rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 129,45% yang berkategori berhasil.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2020, disampaikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	113,37%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	Berhasil
		Persentase Desa Maju di Kecamatan	175%	Sangat Berhasil

KETERANGAN :

No	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

➤ **SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	% Capaian	Kategori
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan Kesekretariatan	100%	Berhasil
	a. Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat masuk keluar yang Dikelola	102,8%	Berhasil
		Jumlah pengelolaan keuangan dan barang yang Terbayar	100%	Berhasil
		Jumlah BBM yang disediakan	63,41%	Kurang
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas Pajaknya	100%	Berhasil
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	112,4%	Sangat Berhasil
		Rekening listrik, air telepon dan internet yang terbayar	100%	Berhasil
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	100%	Berhasil
		Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia	63,37%	Kurang

		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	76,45%	Cukup
		Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	76,21%	Cukup
		Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	100%	Cukup
		Jumlah jam lembur yang terbayar	37,04%	Kurang
	b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	139,66%	Sangat Berhasil
	c. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor/rumah dinas/jabatan yang dibangun	100%	Berhasil
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	89,47%	Cukup
		Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat	-	-
	d. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	54,20%	Kurang

		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	Cukup
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan Yang dipelihara	121,62%	Sangat Berhasil
	e. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	100%	Berhasil
		Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun (RKA dan DPA)	100%	Berhasil
	f. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah data dan informasi yang disusun	-	-
		Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	100%	Berhasil
		Jumlah dokumen SKM yang disusun	-	-
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	100%	Berhasil
	g. Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	100%	Berhasil

➤ **SASARAN 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	% Capaian	Kategori
1	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesos, keamanan dan ketertiban umum	100%	Cukup
		b. prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100%	Berhasil
		c. persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data IDM secara valid	100%	Berhasil
	a. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	100%	Berhasil
	b. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	100%	Berhasil
	c. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil
	d. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	Berhasil
	e. Koordinasi dan	Prosentase rekomendasi		

	kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan	hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	91,63%	Berhasil
	f. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	Berhasil
	g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Prosentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya	100%	Berhasil
	h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan	Prosentase monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya	100%	Berhasil
	i. Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	a. jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba seksi tramtibus	-	-
	i. Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan IMB usaha mikro dan IMB rumah tinggal	Prosentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis	86,81%	Cukup
	j. Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan SIUP, TDP usaha mikro	Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan	45%	Kurang
	k. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perbup, pengawasan dan penertiban usaha, penanganan konflik sosial	a. prosentase temuan pelanggaran perda yang ditangani b. prosentase temuan konflik sosial yang ditangani	a. 66,66% b. 0	Cukup
	k. Pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	100%	Berhasil
	m. Pembinaan perangkat	a. Prosentase desa yang	a. 100%	Berhasil

	desa	telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan b. Prosentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan	b. 100%	Berhasil
	o. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan pedagang kaki lima	a. Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan b. Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan	- -	- -
	p. Pembinaan lembaga dan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan	100%	Berhasil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran serta pertanggung jawaban kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Selain itu LAKIP merupakan dokumen yang terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama, RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka Kecamatan Prambon dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, disusun LAKIP Kecamatan Prambon sebagai salah satu bentuk Pertanggungjawaban Kegiatan Tahunan (PKT) serta LAKIP sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Prambon Tahun 2020 mengacu kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Keuangan.

B. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Kecamatan Prambon adalah :

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi kecamatan Prambon
- Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Prambon. Dari hasil evaluasi diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dan masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Prambon.

1.2 Gambaran Umum OPD

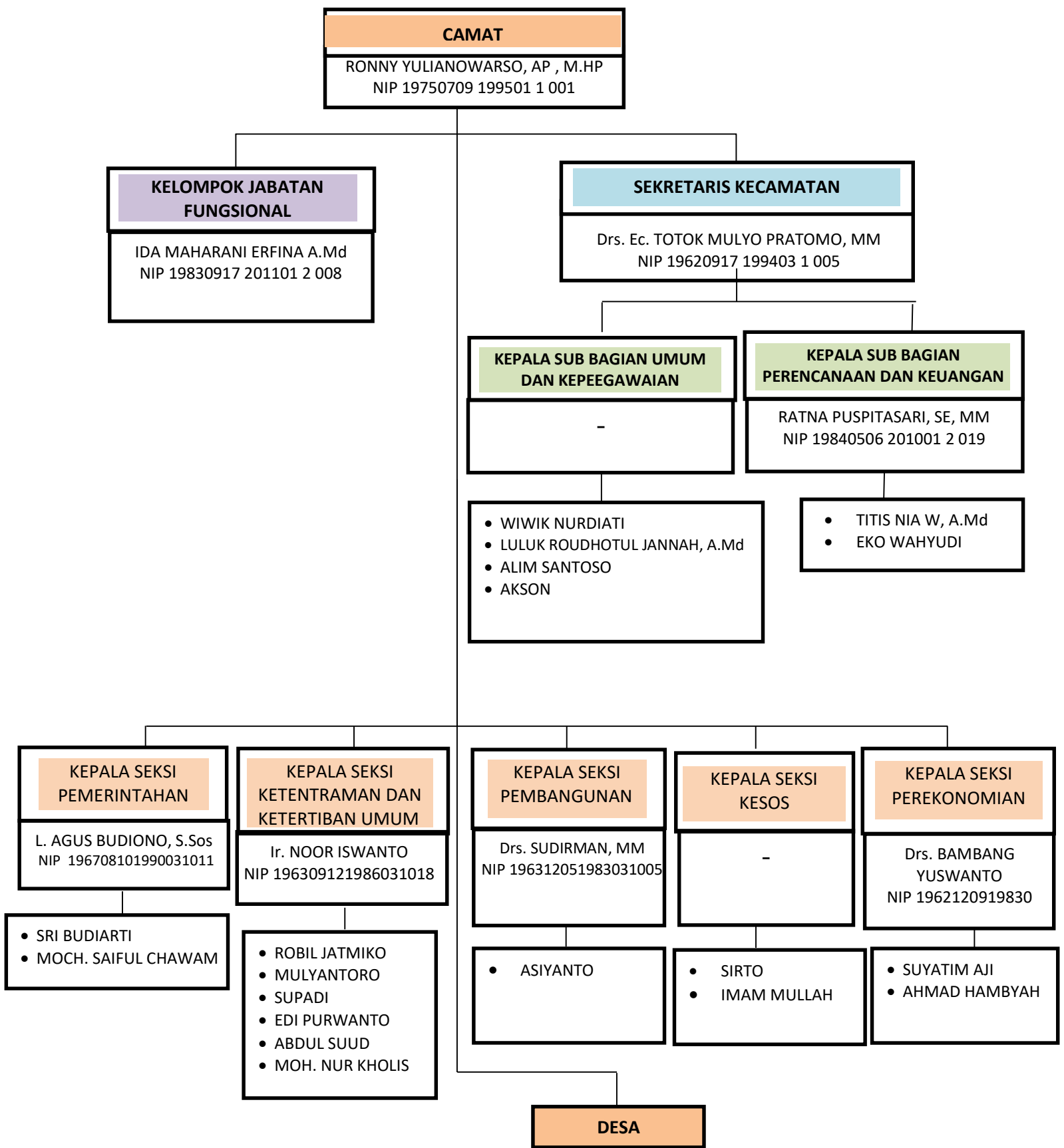
A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Prambon mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di kabupaten sidoarjo, terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
Membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Kepala Seksi Perekonomian
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kepala Seksi Pembangunan

Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Prambon :

Tabel 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PRAMBON



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Keberadaan Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan suatu daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Bupati Sidoarjo tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Prambon adalah:

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Selain tugas atributif di atas, Camat juga menjalankan tugas delegatif, yaitu menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 tahun 2008 pada bidang-bidang :

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- e. Perhubungan;
- f. Tenaga Kerja;
- g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- i. Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas, Camat berwenang menandatangani :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
- d. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 2. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRAMTIB)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban secara *ex officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:

1. pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
2. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
3. pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar);
4. penanganan konflik sosial;
- c. Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 1. pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 2. pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 1. pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 2. pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.

- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

9. Seksi Pembangunan Fisik

Seksi Pembangunan Fisik dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Fisik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan Fisik mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan. Dalam melaksanakan tugasnya, sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo, Seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 - 1. pembinaan penanganan sampah domestic;
 - 2. pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi).
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. Aspek Strategis OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem pelayanan yang baik. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada.

Kondisi aparaturnya Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan aparaturnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Prambon
Tahun 2020

No	Uraian	Golongan								Kontrak		Jumlah
		IV		III		II		I				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Camat	1										1
2	Sekretariat	1			3	3	2					9
3	Seksi Pemerintahan			1		1	1					3
4	Seksi Pembangunan Fisik	1				1						2
5	Seksi Kesos	1				2						3
6	Seksi Tramtib			1		6		1				8
7	Seksi Perekonomian			1		2						3
8	Tenaga Kontrak									11	2	13
Jumlah												42

1. Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan peta jabatan, maka ASN dan Non ASN OPD Kecamatan Prambon dapat digolongkan berdasarkan jabatan yang diemban sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2020

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Pejabat Struktural	7	1	8
2	Pengelola bahan perencanaan	1		1
3	Pengelola kepegawaian			
4	Pengelola data pelayanan		1	1
5	Pengelola administrasi pemerintahan		1	1
6	Pengelola keamanan dan ketertiban			
7	Pengelola pembinaan dan pengembangan perekonomian	1		1
8	Pengelola kesejahteraan sosial	1		1

9	Pengelola data	1	1	2
10	Bendahara		1	1
11	Pengelola gaji			
12	Pengadministrasi umum	4		1
13	Pengadministrasi keuangan		1	1
14	Pengadministrasi sarana dan prasarana	1		1
15	Pengadministrasi kependudukan		1	1
16	Pengadministrasi pemerintahan	1		1
17	Pranata pasukan pengamanan dalam	10		10
18	Pramu bakti			
19	Pramu kebersihan	3		3
20	Pejabat fungsional (Pranata komputer pelaksana)		1	1
21	Pengemudi kendaraan pengangkut sampah	2		2
22	Tenaga kebersihan pengangkut sampah	2		2
Jumlah		34	8	42

2. Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo menurut data kepegawaian berjumlah 42 orang. Terdiri dari ASN sejumlah 31 orang dan non ASN sejumlah 13 orang. Berdasarkan pangkat dan golongan tenaga ASN Kecamatan Prambon dapat direkap sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Golongan IV	4		4
2.	Golongan III	4	3	7
3.	Golongan II	14	3	17
4.	Golongan I	1	-	1
Jumlah		23	6	29

3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Kecamatan Prambon dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	4	1	5
2.	Sarjana	8	1	9
3.	Diploma	-	3	3
4.	SMA	20	3	23
5.	SMP	1	-	1
6.	SD	1	-	1
Jumlah		34	8	42

b. Aset Yang Dimiliki

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Prambon telah tersedia sarana dan prasarana meliputi:

Tabel 1.5
Jumlah Sarana Yang Dimiliki Tahun 2020

No	Sarana	Jumlah	Status
1	Kendaraan Roda Empat	3 Unit	Baik
2	Kendaraan Khusus (patrol)	1 Unit	Baik
3	Kendaraan Roda dua	12 Unit	Baik
4	Kendaraan Roda tiga	2 unit	Baik
5	Laptop	10 Unit	Baik
6	Komputer	16 Unit	Baik
7	Printer	20 Unit	Baik
8	Mesin Scaner	2 Unit	Baik

9	Mesin Ketik	1 Unit	Baik
10	LCD	2 Unit	Baik
11	Server	1 Unit	Baik
12	AC	26 Unit	Baik

Sedangkan Prasarana Gedung Kantor Kecamatan Prambon terdiri dari 2 Unit dengan luas $\pm 2.200 \text{ M}^2$. Penggunaan kantor kecamatan terdiri dari:

1. Kantor kecamatan
2. Pendopo
3. Ruang Rapat
4. Ruang Dinas Instansi
5. Ruang PKK
6. Mushola
7. Tempat Parkir
8. Ruang Serba Guna

c. Isu Strategis Yang Dihadapi

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Prambon

Berdasarkan hasil analisis terhadap Indikator Kinerja Tujuan di tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja tujuan, yang selanjutnya membandingkan antara realisasi tahun 2015 dengan realisasi tahun sebelumnya (selama periode Renstra), maka isu-isu strategis yang terkait adalah:

1. Jumlah sumber daya manusia bidang teknis masih belum tercukupi secara kuantiti maupun kualitas akan tetapi pihak kecamatan tetap mengupayakan sumber daya yang ada dengan cara mengintensifkan pendampingan dan pelatihan teknis.
2. Peran Kecamatan Prambon cukup strategis dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ke Kecamatan akan tetapi tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai.
3. Sarana dan Prasarana secara kuantitas sudah cukup tetapi secara kualitas masih kurang memadai terutama kondisi gedung (ruang kerja), penataan gedung yang tidak teratur karena tidak mempunyai masterplan gedung kantor. Kecamatan Prambon terus mengupayakan masterplan gedung kantor yang dituangkan pada Renja.
4. Ada beberapa desa yang memiliki perangkat desa dimana etos kerjanya kurang bagus sehingga mengakibatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa kurang maksimal (penyusunan APBDes, Musrembangdes, LPPD), akan tetapi

pihak Kecamatan Prambon tiada henti tetap mendampingi Perangkat Desa agar kinerja desa semakin baik.

5. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan bertanggung jawab, Kecamatan Prambon terus berusaha memperbaiki sistem pelayanan terpadu berbasis IT dengan terus mengupgrade aplikasi/software.
6. Peran desa dalam mewujudkan desa maju masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari data IDM tahun 2019 yang berkategori desa maju di Kecamatan Prambon hanya 3 desa. Hal ini dikarenakan minimnya tingkat kepedulian desa dalam entry profil desa. Oleh karena itu pihak kecamatan akan terus mendampingi agar predikat desa maju di Kecamatan Prambon dapat meningkatkan secara kuantitas dan kualitas.
7. Penanganan sampah domestik yang merupakan salah satu program kabupaten yang didelegasikan kepada camat, di Kecamatan Prambon sudah dilaksanakan, namun tidak didukung TPST sehingga petugas sampah kesulitan membuang sampah ke TPST. Namun demikian Kecamatan Prambon terus berupaya mengusulkan TPST pada instansi terkait.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD

Secara umum permasalahan yang terjadi di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo pada saat ini adalah :

- a. Belum validnya data tentang administrasi barang daerah yang ada di Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Belum tercukupinya ASN baik secara kuantitas maupun kualitas.
- c. Tuntutan perkembangan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, yaitu di satu sisi pembangunan harus tetap berjalan di pihak lain kelestarian dan fungsi lingkungan harus tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya.
- d. Peralihan sistem keuangan dari tunai ke non tunai dengan aplikasi yang terus dikembangkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 Perencanaan Strategis

a. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Perencanaan strategis Kecamatan Prambon memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 dengan Renstra Kecamatan Prambon

Misi RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan RPJMD Kab. Sidoarjo	Sasaran RPJMD Kab. Sidoarjo	Tujuan Renstra OPD	Sasaran Renstra OPD
MISI Ke 1 Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif, dan transparan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan
MISI Ke 2 Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UKM, dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b. Matriks Rencana Strategis

Tabel 2.2
Matriks Rencana Strategis Kecamatan Prambon
Tahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	KEGIATAN	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	75	75	76	77	78	79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kasubag Umum dan Kepegawaian
											2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
											3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	
											4. Penyediaan jasa kebersihan	

											kantor/keamanan kantor/pengemudi	
											5. Penyediaan alat tulis kantor	
											6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
											7. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	
											8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
											9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	
											10. Penyediaan bahan logistik kantor	
											11. Penyediaan	

											makanan dan minuman	
											12. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah, dan luar negeri	
											13. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PD	
										Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kasubag Umum dan Kepegawaian
											2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
											3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
											4. Pemeliharaan rutin/berkala	

											perlengkapan dan peralatan gedung kantor	
											5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
										Program peningkatan disiplin aparatur	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
										Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja OPD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
											2. Penyusunan laporan keuangan	
										Program penyelenggaraan pelayanan umum	1. Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum	Kasubag Umum dan Kepegawaian
											2. Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum	

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

N O	SASARAN STRATEGIS		DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	TAHUN DASAR	TARGET TAHUNAN					STRATEGI PENCAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesos, agama dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum b. Persentase Desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan kategori baik	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan dalam satu tahun}} \times 100$	60%	65%	75%	80%	85%	90%	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum	1. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan	Kasi Pemerintahan
											2. Pembinaan perangkat desa	Kasi Pemerintahan
											3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
											4. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Kasi Pemerintahan
											5. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam bidang pembangunan dan lingkungan	Kasi Pembangunan
											6. Pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan	Kasi

											hidup dan penanganan sampah domestik	Pembangunan
											7. Pengelolaan lingkungan hidup	Kasi Pembangunan
											8. Pelayanan pemrosesan permohonan perijinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	Kasi Pembangunan
											9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan dan lingkungan	Kasi Pembangunan
											10. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian	Kasi Perekonomian
											11. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan pedagang kaki lima	Kasi Perekonomian
											12. Pelayanan pemrosesan permohonan perijinan SIUP, TDP	Kasi Perekonomian

											Usaha Mikro	
											13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian	Kasi Perekonomian
											14. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Kasi Trantibum
											15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perbup, pengawasan dan penertiban usaha, penanganan konflik sosial	Kasi Trantibum
											16. Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	Kasi Trantibum
											17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Kasi Trantibum
											18. Koordinasi dan	Kasi

											kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	Kesejahteraan Sosial
											19. Pembinaan lembaga dan kegiatan sosial , agama dan kemasyarakatan	Kasi Kesejahteraan Sosial
											20. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	Kasi Kesejahteraan Sosial

1.2 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2020

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Prambon
Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS		Target 2020	PROGRAM		Target 2020	KEGIATAN		Target 2019	ANGGARAN
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	78	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan kesekretariatan	98%	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3000 surat	Rp. 771.961.940
								Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	14 orang/bulan	
								Jumlah BBM yang disediakan	8000 liter	
								Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	19 unit	
								Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	750 kotak	
								Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	

								Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	-	
								Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	12 buah	
								Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia	243 buah	
								Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	841 buah	
								Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	1825 buah	
								Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	5 orang	
								Jumlah jam lembur yang terbayar	1768 jam	
							Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 135.420.535
								Nilai survey kepuasan masyarakat	78%	
							Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor/rumah dinas/jabatan yang dibangun	1 Paket	Rp. 479.589.500

								Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	
								Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang diadakan	19 unit	
								Jumlah luas gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat	-	
							Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang dipelihara	738 m2	Rp. 341.258.000
								Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 unit	
								Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan Yang dipelihara	37 unit	
							Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	7 dokumen	Rp. 6.620.900

								Jumlah dokumen penganggaran PD yang disusun (RKA dan DPA)	4 dokumen	
								Jumlah data dan informasi yang disusun		
							Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	4 dokumen	Rp. 6.606.900
								Jumlah dokumen SKM yang disusun	-	
								Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	2 Laporan	
							Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	13 laporan	Rp. 5.269.400
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Persentase Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya yang Didelegasikan ke Kecamatan dilaksanakan dengan baik,	a. 100%	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam satu tahun bidang :pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesos, keamanan dan ketertiban	a. 85%	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Prosentase APBDes yang telah dilakukan evaluasi	100%	Rp. 27.000.000
		b. Persentase Desa Maju di	b. 20%				Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	85%	Rp. 1.125.000

		Kecamatan			<p>umum</p> <p>b. Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan</p> <p>c. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data IDM secara valid</p>	<p>b.85%</p> <p>c.85%</p>	<p>Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan</p> <p>Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan</p> <p>Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian</p>	<p>Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti</p> <p>a.Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Prosentase desa yang telah melakukan Musrenbang</p> <p>Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti</p> <p>Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti</p>	<p>85%</p> <p>a. 0</p> <p>b.100%</p> <p>80%</p> <p>85%</p>	<p>Rp. 8.100.000</p> <p>Rp. 12.385.400</p> <p>Rp. 14.875.000</p> <p>Rp. 3.900.000</p>
--	--	-----------	--	--	--	---------------------------	--	--	--	---

							Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Prosentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya	85%	Rp. 1.800.000	
							Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan	Prosentase monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya	85%	Rp. 10.035.600	
							Pelayanan Pemrosesan Permohonan Perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	a. Prosentase SIUP Usaha Mikro yang diterbitkan b. Prosentase TDP Usaha Mikro yang diterbitkan	a. 100% b. 100%	Rp. 2.890.000	
							Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba seksi tramtibum	a. 2 Kegiatan b.0	Rp. 11.839.860	
							Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan IMB usaha mikro dan IMB rumah tinggal	a. Prosentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis b. Persentase permohonan IMB Rumah Tinggal 1	a. 100% b. 0%	Rp. 3.435.000	

								lantai luasan maksimal bangunan 400 m2 yang telah diberi saran teknis		
							Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perbup, pengawasan dan penertiban usaha, penanganan konflik sosial	a. Persentase temuan pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani b. Persentase temuan konflik sosial yang ditangani	a. 100% b. 100%	Rp. 202.435.400
							Pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	a. Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik b. Jumlah kader lingkungan hidup	a. 100% b. 0 Orang	Rp. 149.611.200
							Pembinaan perangkat desa	a. Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan b. Prosentase desa	a. 100% b. 90%	Rp. 6.925.000

								yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan		
							Pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan pedagang kaki lima	a. Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan b. Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan	a. 85% b. 0 %	Rp. 7.156.000
							Pembinaan lembaga dan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan	80%	Rp. 131.980.000

1.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk a) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; c) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; d) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan e) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Prambon telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2020 disusun mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun 2020 yang telah disahkan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Prambon Tahun 2020, antara lain :

1). Perjanjian Kinerja Camat

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja OPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	78%
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya yang Didelegasikan ke Kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%
		2. Persentase Desa Maju di Kecamatan	20%

2). Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan

No.	Program	Indikator Program	Target Tahun 2020	Penanggung Jawab
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur OPD kecamatan terhadap pelayanan kesekretariatan	98%	Sekretaris Kecamatan

3). Perjanjian Kinerja Kasubag dan Kepala Seksi

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2020	Penanggung Jawab
1	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat masuk keluar yang dikelola	3000 surat	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	14 Orang/Unit	
		Jumlah BBM yang disediakan	8000 Liter	
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	19 Unit	
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	750 Kotak	
		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	
		Jumlah buku bacaan dan koran yang tersedia	12 Buah	
		Jumlah komponen listrik / penerangan kantor yang tersedia	243 Buah	
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	841 Buah	

		Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	1.825 Buah	
		Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	5 Orang	
		Jumlah jam lembur yang terbayar	1768 Jam	
2	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar Negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	19 unit	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dibangun	1 Paket	
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang Dipelihara	738 M2	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang Dipelihara	19 unit	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang Dipelihara	37 unit	
5	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	7 dokumen	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan	4 dokumen	
6	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 dokumen	Kasubag Perencanaan & Keuangan
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang Disusun	2 laporan	

7	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang disusun	13 laporan	Kasubag Perencanaan & Keuangan
8	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	100 %	Kasi Pemerintahan
9	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	85 %	Kasi Kesos
10	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	85 %	Kasi Tramtibum
11	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	0 %	Kasi Pembangunan
		Prosentase desa yang telah melakukan Musrenbang	100 %	
12	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	85 %	Kasi Pemerintahan
13	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	85 %	Kasi Perekonomian
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Prosentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya	85 %	Kasi Kesos
15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan	Prosentase monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya	85 %	Kasi Pemerintahan
16	Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	0 kegiatan	Kasi Tramtibum
		Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba seksi tramtibum	-	

17	Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan IMB usaha mikro dan IMB rumah tinggal	Prosentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis	-	Kasi Pembangunan
		Prosentase permohonan IMB rumah tinggal 1 lantai luasan maksimal 400 m2 yang telah diberi saran teknis	100%	
18	Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan SIUP, TDP usaha mikro	Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan	100%	Kasi Perekonomian
		Prosentase TDP usaha mikro yang diterbitkan	100%	
19	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perbup, pengawasan dan penertiban usaha, penanganan konflik sosial	Prosentase temuan pelanggaran perda yang ditangani	100%	Kasi Tramtibum
		Prosentase temuan konflik sosial yang ditangani	100%	
20	Pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah Domestik	100%	Kasi Pembangunan
		Jumlah kader lingkungan hidup	-	
21	Pembinaan perangkat desa	Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan	100%	Kasi Perekonomian
		Prosentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan	90%	
22	Pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan pedagang kaki lima	Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti Pembinaan	85%	Kasi Kesos
		Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan	-	
23	Pembinaan lembaga dan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang telah mengikuti Pembinaan	85%	

1). Anggaran Per Program / Kegiatan

Tabel 2.5
Anggaran Per Program / Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp. 1.746.727.175
	a. Penyediaan barang/jasa perkantoran	Rp. 771.961.940
	b. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Rp. 135.420.535
	c. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 479.589.500
	d. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 341.258.000
	e. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran data dan informasi PD	Rp. 6.620.900
	f. Penyusunan laporan keuangan	Rp. 5.269.400
	g. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja PD	Rp. 6.606.900
2	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	Rp. 595.493.460
	a. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Rp. 27.000.000
	b. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Rp. 1.125.000
	c. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 8.100.000
	d. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan	Rp. 12.385.400
	e. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan	Rp. 14.875.000
	f. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian	Rp. 3.900.000
	g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Rp. 1.800.000

h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan	Rp. 10.035.600
i. Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	Rp. 11.839.860
j. Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan IMB usaha mikro dan IMB rumah tinggal	Rp. 3.435.000
k. Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	Rp. 2.890.000
l. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perbup, pengawasan dan penertiban usaha, penanganan konflik sosial	Rp. 202.435.400
m. Pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	Rp. 149.611.200
n. Pembinaan perangkat desa	Rp. 6.925.000
o. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan pedagang kaki lima	Rp. 7.156.000
p. Pembinaan lembaga dan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan	Rp. 131.980.000
Jumlah	Rp. 2.342.220.635

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Daerah

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78%	88,43%	113,37%

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

Pengukuran kinerja jangka menengah/tujuan tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja tujuan di tahun 2020 dengan target dan indikator kinerja tujuan di tahun 2021.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Jangka Menengah

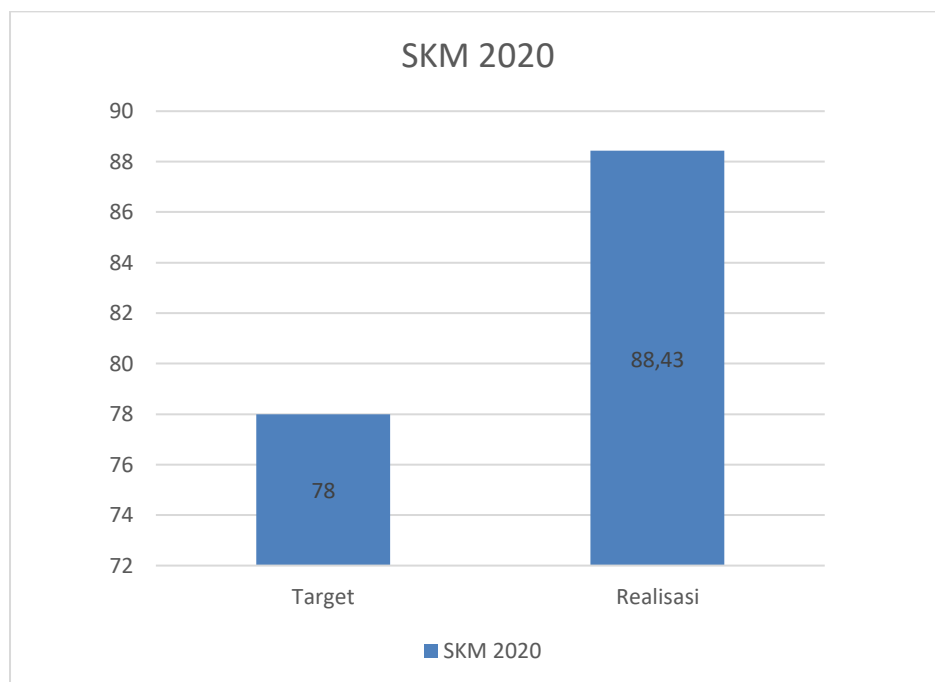
No.	TUJUAN	Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2021	Realisasi di Tahun 2020	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	79	88,43	111,93%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	76	76,99	101,30%
		Nilai rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Prambon	0,7456	0,6804	91,25%

b. Analisis Pencapaian Kinerja Jangka Menengah
i. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

Tabel 3.3
Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

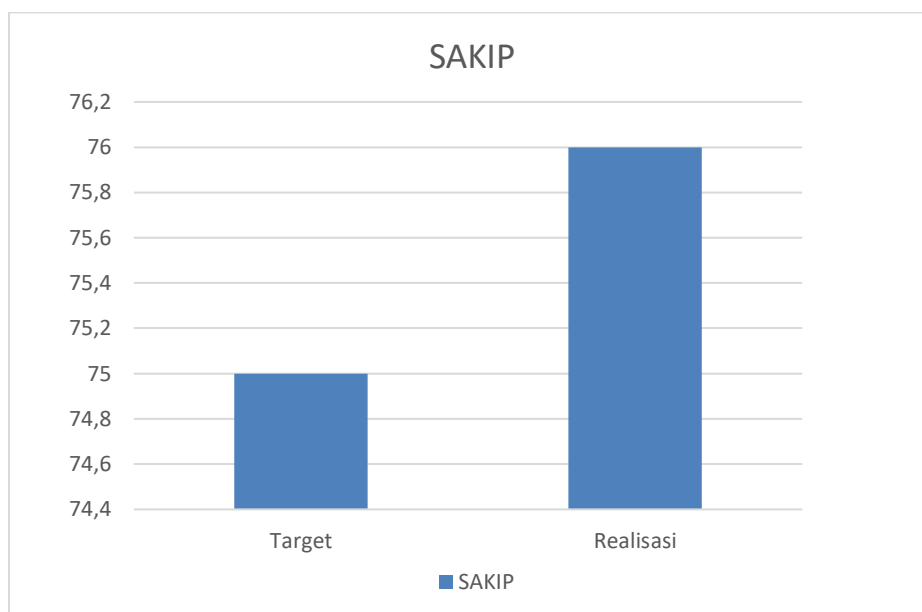
NO	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2020	Target s.d Tahun 2020	Capaian (%)
1	Nilai SKM Kecamatan	88,43	78	113,37%
2	Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	76,99	75	102,65%
3	Nilai rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Prambon	0,6804	0,7305	93,14%

Grafik 3.1
Perbandingan antara capaian indikator kinerja tujuan Nilai SKM Tahun 2020 dengan target



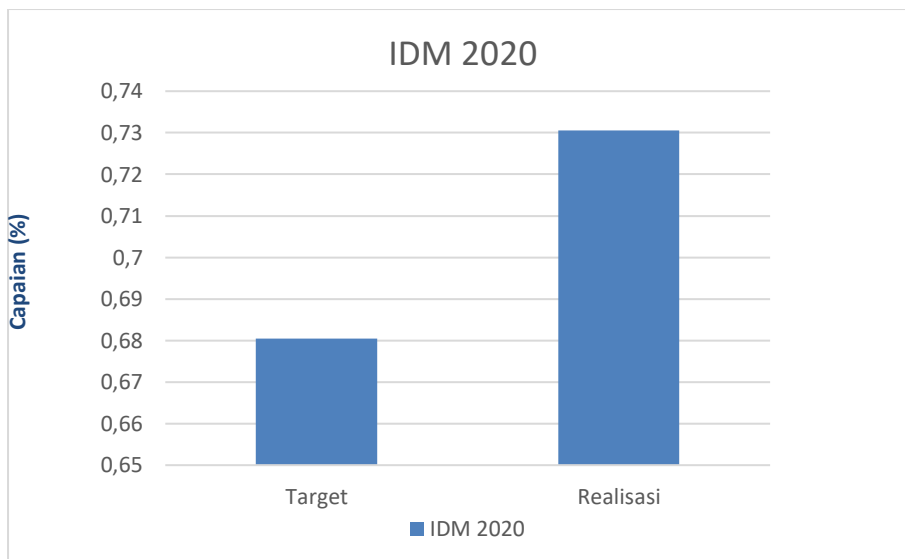
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Survey Kepuasan Masyarakat telah mencapai 113,37% dari target.

Grafik 3.2
Perbandingan antara capaian indikator kinerja tujuan Nilai SAKIP Tahun 2020 dengan target



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Prambon telah mencapai 102,65% dari target

Grafik 3.3
Perbandingan antara capaian indikator kinerja tujuan Nilai IDM Tahun 2020 dengan target



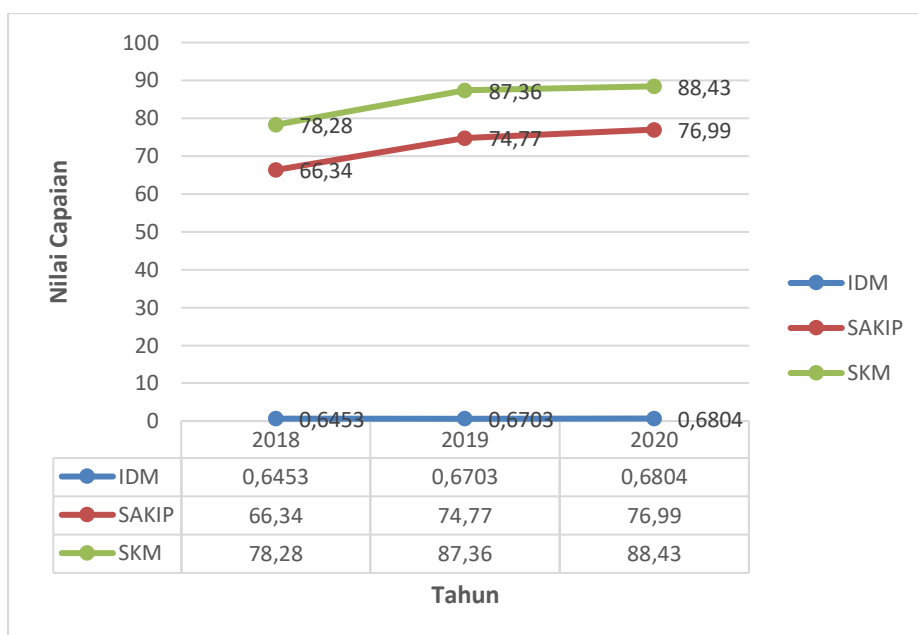
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Peningkatan rata-rata Nilai IDM desa di Kecamatan Prambon telah mencapai 93,14% dari target

ii. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.4
Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Nilai SKM Kecamatan	78,28	87,36	88,43
2	Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	66,34	74,77	76,99
3	Nilai rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Prambon	0,6453	0,6703	0,6804

Grafik 3.4
Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya



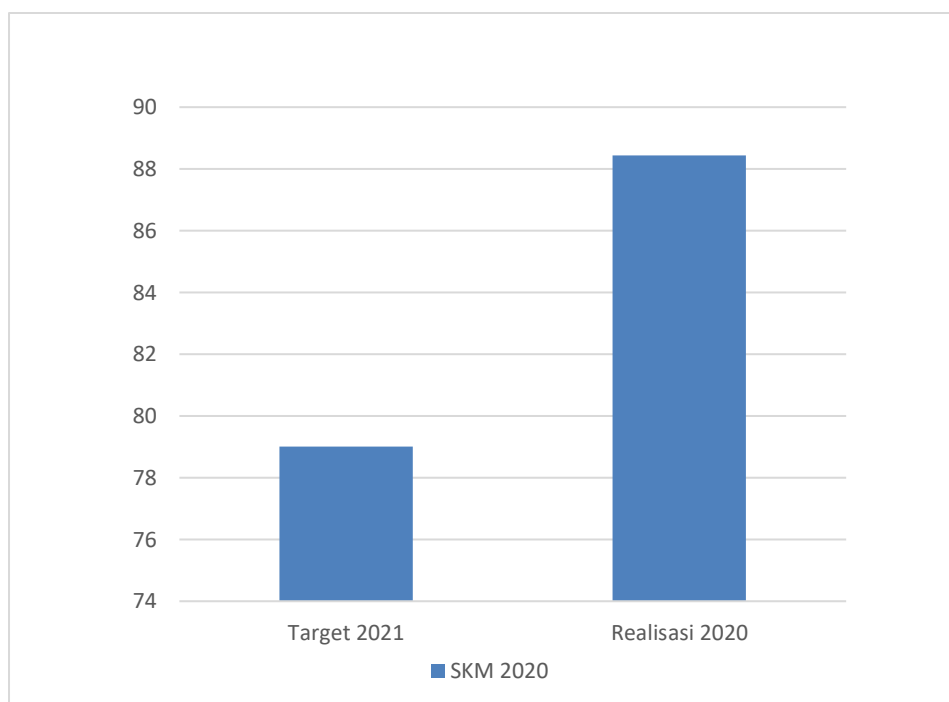
1. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian indikator kinerja Nilai SKM tahun 2020 meningkat dari tahun 2019, dengan kenaikan sebesar 1,07 %.
2. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian indikator kinerja Nilai SAKIP tahun 2020 meningkat dari tahun 2019, dengan kenaikan sebesar 2,22 %.
3. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian indikator kinerja Nilai Rata-Rata IDM tahun 2020 meningkat dari tahun 2019, dengan kenaikan sebesar 0,0101 %.

iii. **Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah**

Tabel 3.5
Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

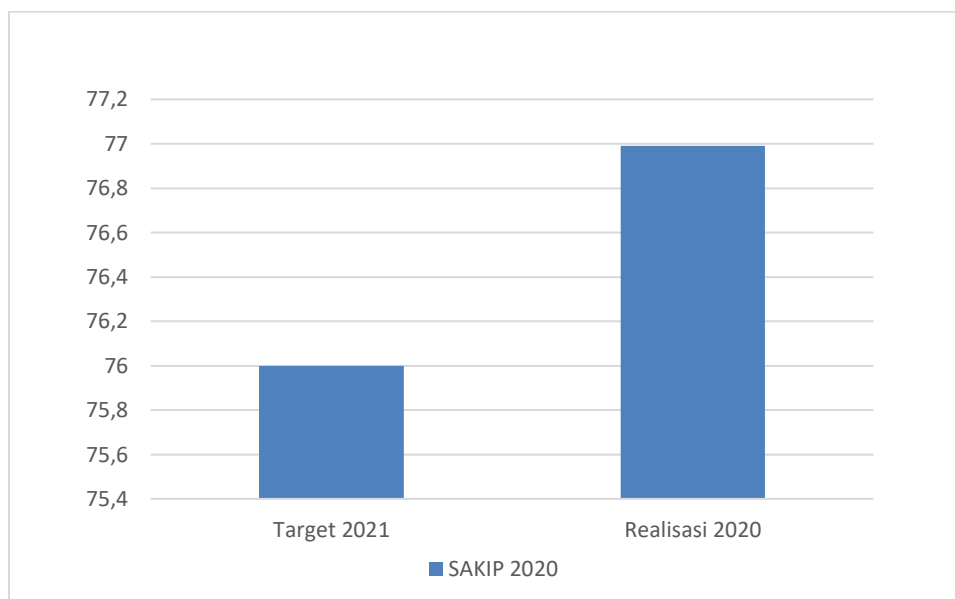
No	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi s.d Tahun 2020	Target Tahun 2021	Capaian (%)
1	Nilai SKM Kecamatan	88,43	79	111,93%
2	Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	76,99	76	101,30%
3	Nilai rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Prambon	0,6804	0,7456	91,25%

Grafik 3.5
Perbandingan antara capaian kinerja Nilai SKM 2020 dengan target jangka menengah



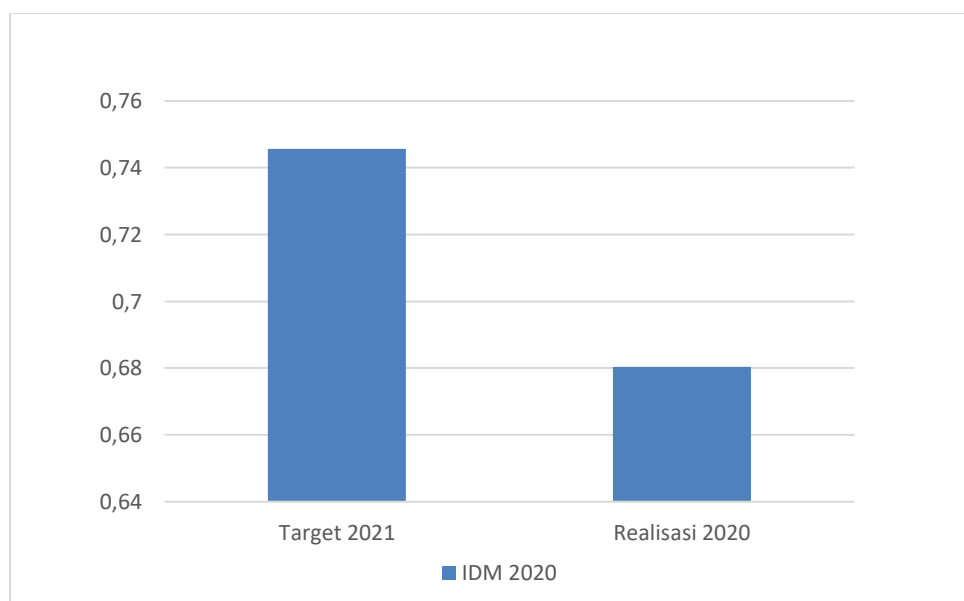
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Survey Kepuasan Masyarakat telah mencapai 111,93% dari target.

Grafik 3.6
Perbandingan antara capaian kinerja Nilai SAKIP 2020 dengan target jangka menengah



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mencapai 101,30% dari target jangka menengah.

Grafik 3.7
Perbandingan antara capaian kinerja Nilai Rata-Rata IDM 2020 dengan target jangka menengah



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Peningkatan Rata – Rata Nilai IDM telah mencapai 91,25% dari target jangka

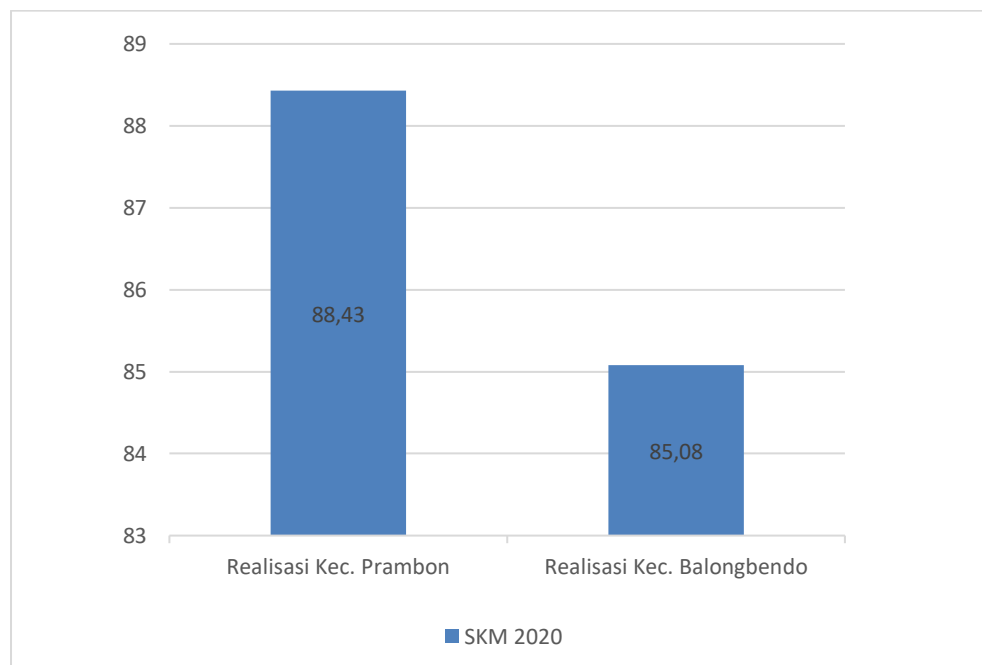
menengah.

iv. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

Tabel. 3.6
Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

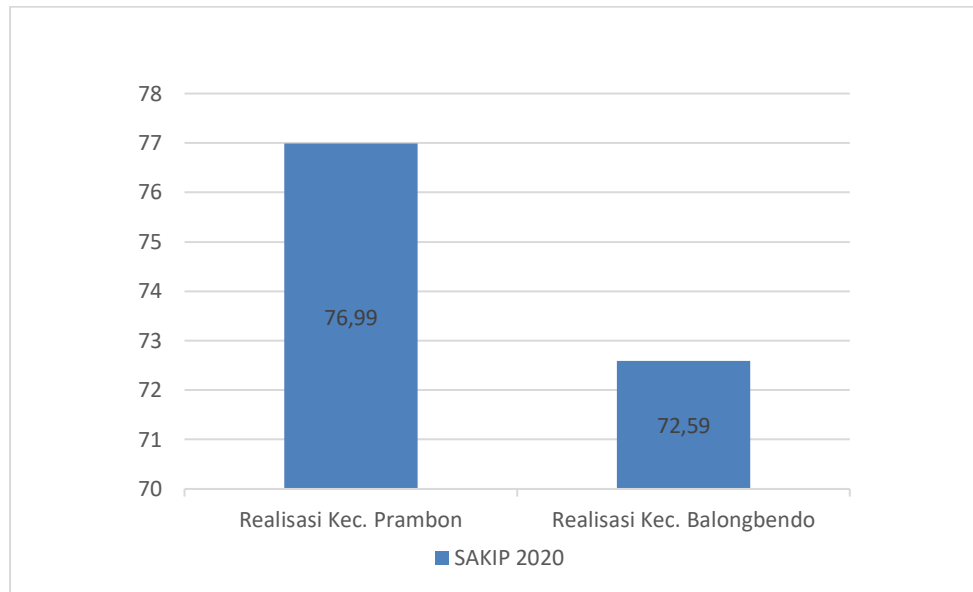
No	Indikator kinerja sasaran	Kecamatan Prambon (2020)			Kecamatan Balongbendo (2020)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SKM Kecamatan	79	88,430	111,93%	81,50	88,054	100,1%
2	Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	76	76,99	101,30%	80,01	71,90	89,86%
3	Nilai rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Prambon	0,7456	0,6804	91,25%	0,1	0,1	100%

Grafik. 3.8
Perbandingan antara Capaian Kinerja Nilai SKM Tahun 2020 dengan Instansi Sejenis



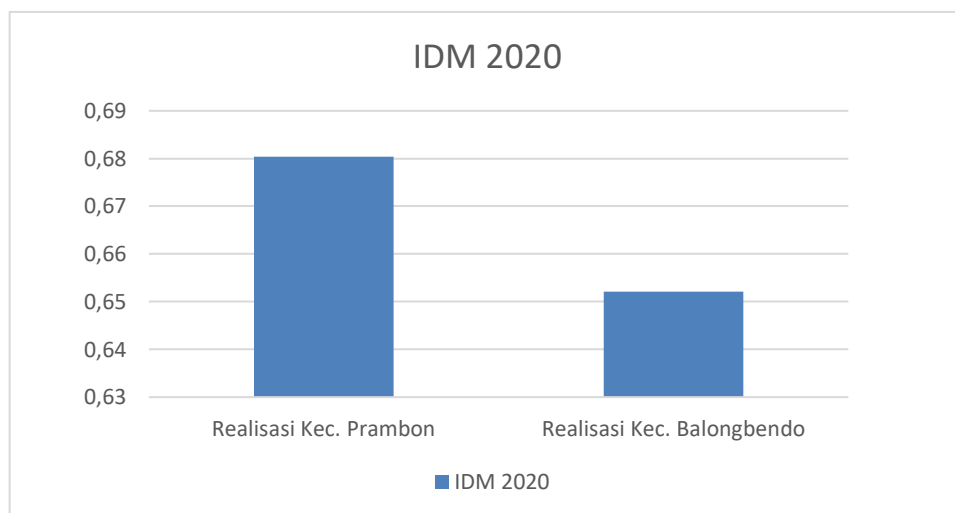
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian indikator kinerja tujuan Nilai SKM Prambon apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Kecamatan Balongbendo, maka capaian kinerja Kecamatan Prambon lebih baik.

Grafik 3.9
Perbandingan antara Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tahun 2020 dengan Instansi Sejenis



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Kecamatan Balongbendo, maka capaian kinerja lebih baik.

Grafik 3.10
Perbandingan antara Capaian Kinerja Nilai Rata-Rata IDM Tahun 2020 dengan Instansi Sejenis



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Kecamatan Balongbendo, maka capaian kinerja lebih baik.

c. Pengukuran Kinerja Tahunan

Pengukuran kinerja tahunan/sasaran tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sasaran di tahun 2020, dengan target dari indikator kinerja sasaran di tahun 2020, sebagaimana pada Renstra.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Tahunan

No.	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	78	88,43	113,45%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase Desa Maju Di Kecamatan	20%	35%	175%

b. Analisis Pencapaian Kinerja Tahunan

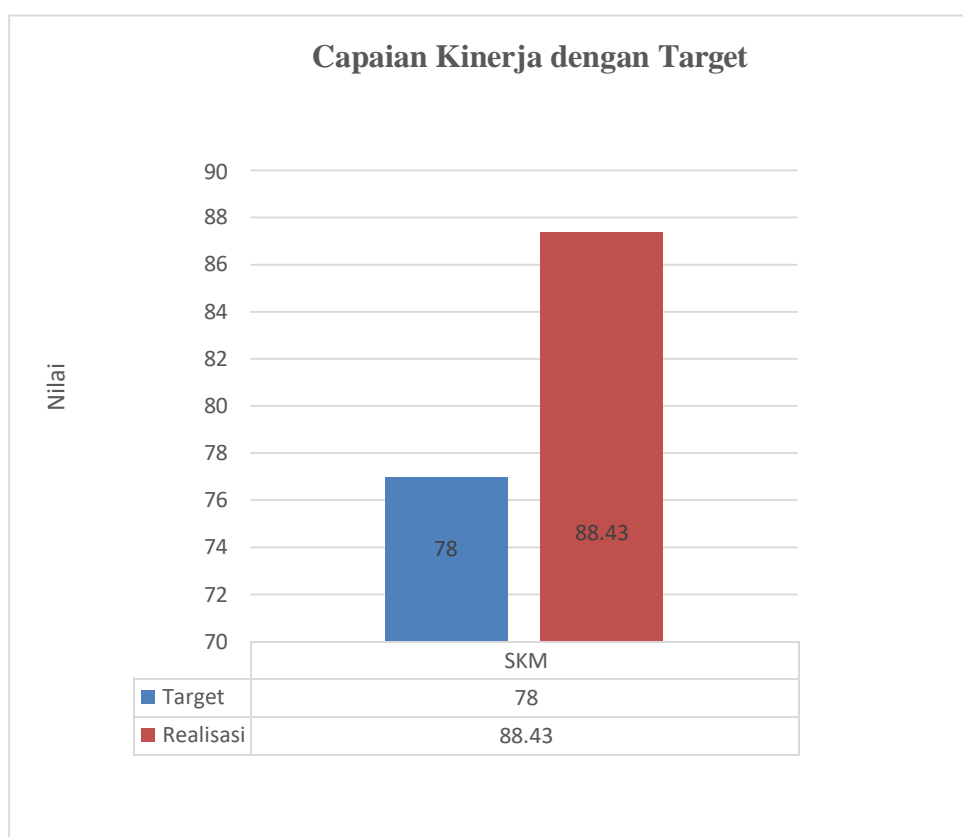
1. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target

Tabel 3.8
Perbandingan antara capaian Indikator kinerja Sasaran dengan target

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2020	Capaian (%)
1	Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	88,43%	78%	113,37%

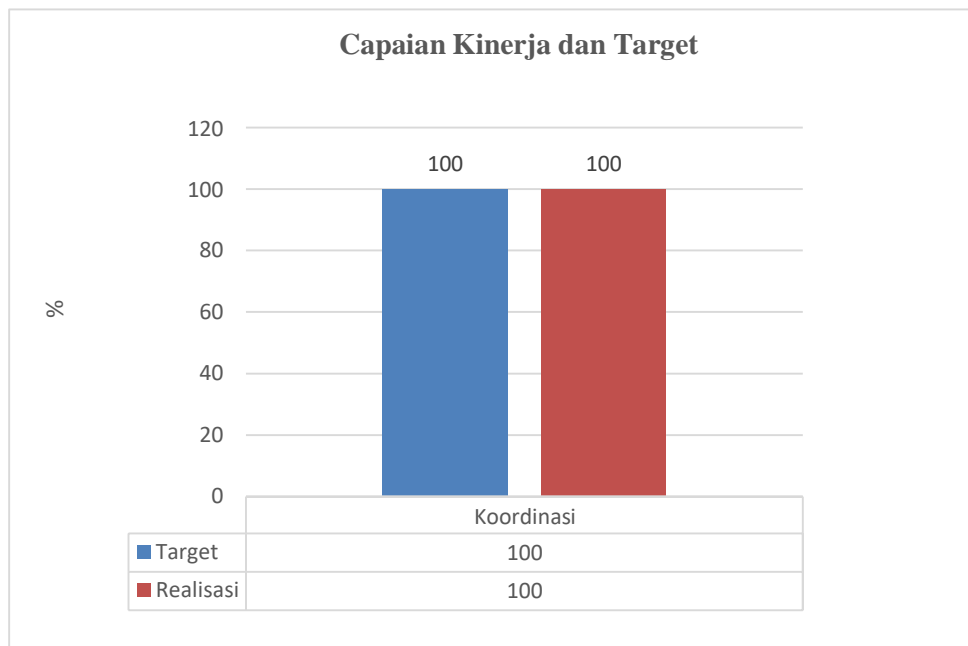
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan	35%	20%	175%

Grafik 3.11
Capaian Indikator kinerja Sasaran Nilai SKM dengan target



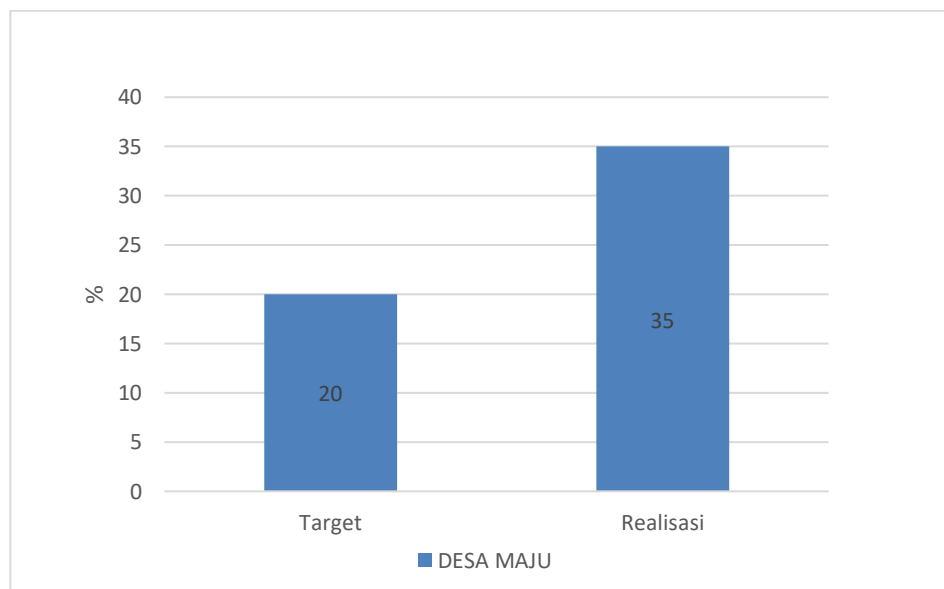
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Nilai SKM telah mencapai 113,37 % dari target.

Grafik 3.12
Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Urusan Pemerintahan Umum
dengan target



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan telah mencapai 100 % dari target.

Grafik 3.13
Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Desa Maju dengan target



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 175% dari target.

2. Perbandingan antara capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.9

Perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya

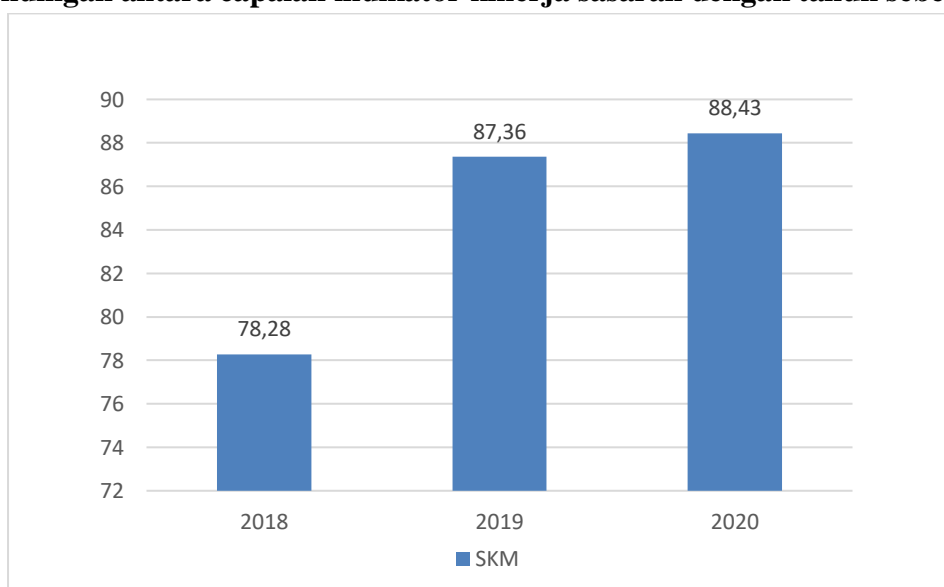
No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
1	Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	78,284	87,36	88,43
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan	-	15%	35%

Grafik 3.8

Perbandingan antara capaian Indikator kinerja Sasaran dengan tahun sebelumnya

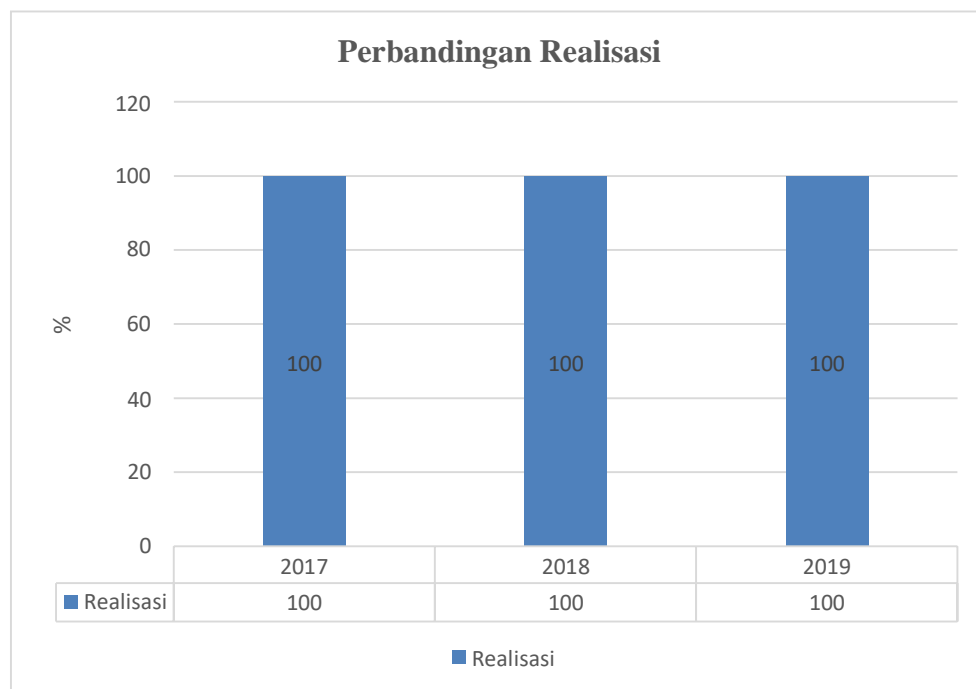
Grafik 3.14

Perbandingan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya



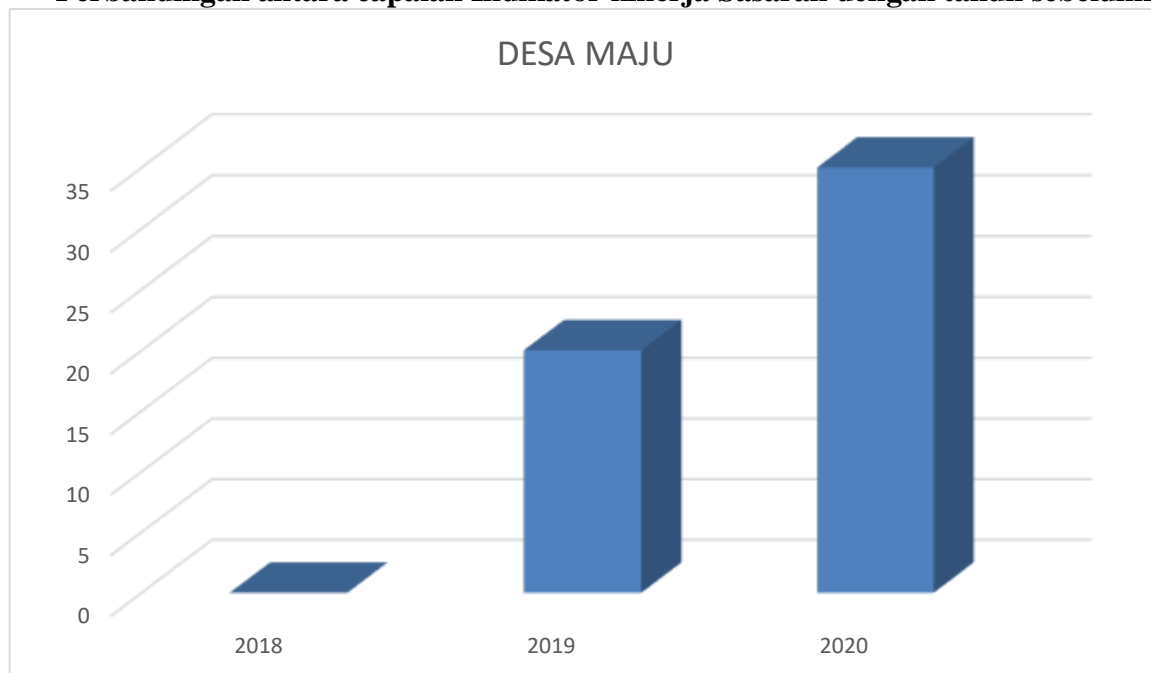
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian indikator kinerja Nilai SKM tahun 2020 meningkat dari tahun 2019, dengan kenaikan sebesar 1,07%

Grafik 3.15
Perbandingan antara capaian Indikator kinerja Sasaran dengan tahun sebelumnya



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja dari tindak lanjut rekomendasi hasil rapat koordinasi tidak ada kenaikan, hal ini dikarenakan semua hasil rapat koordinasi ditindaklanjuti oleh seksi terkait.

Grafik 3.16
Perbandingan antara capaian Indikator kinerja Sasaran dengan tahun sebelumnya



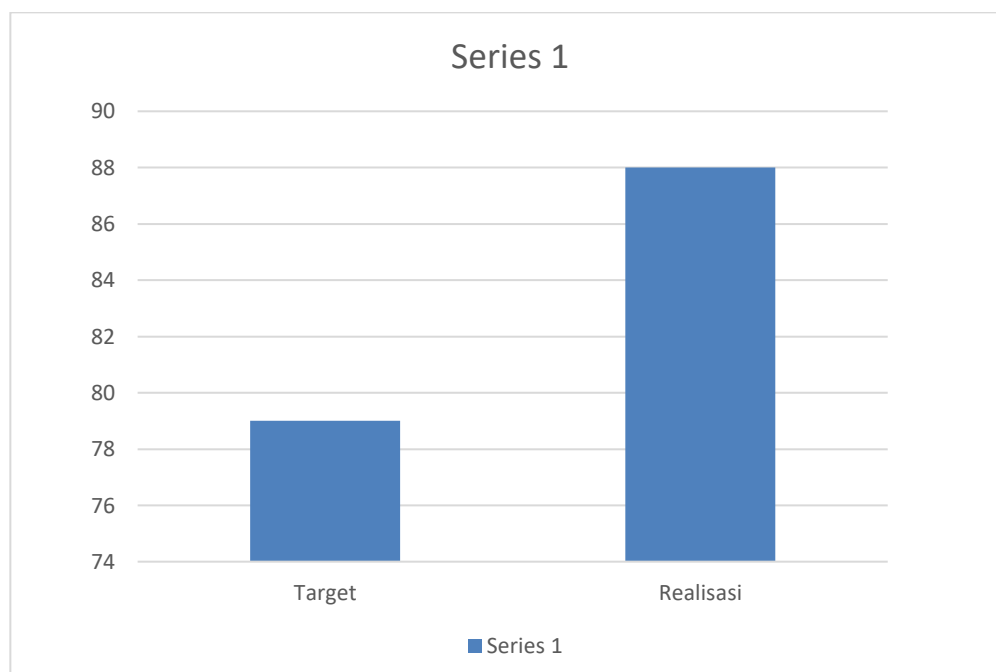
Dari grafik serta tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata Indeks desa membangun pada Desa se – Kecamatan Prambon mengalami peningkatan.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 3.10
Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah

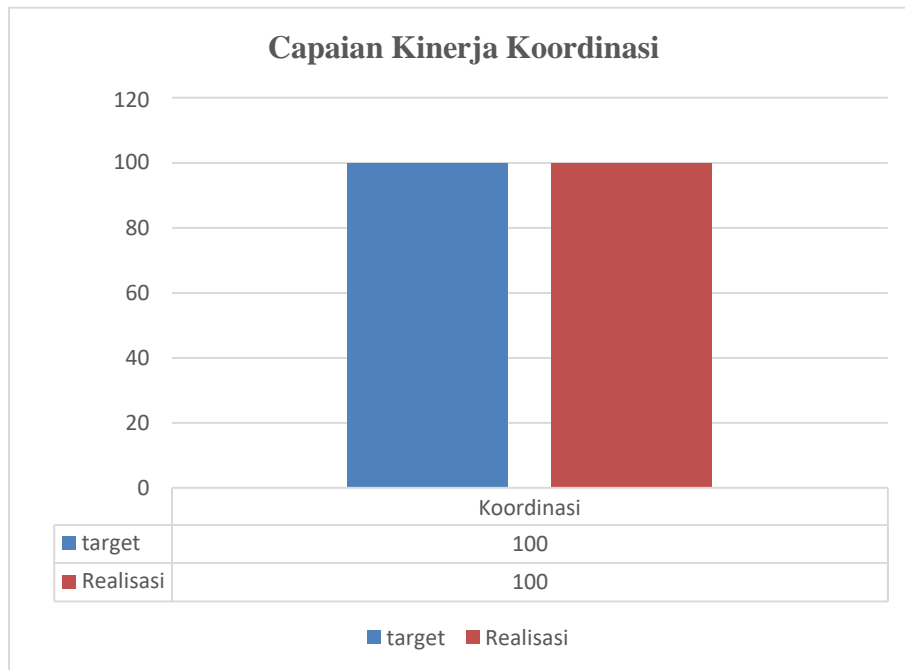
No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
1	Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	88,43	79	111,93%
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan	35%	25%	140%

Grafik 3.17
Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah



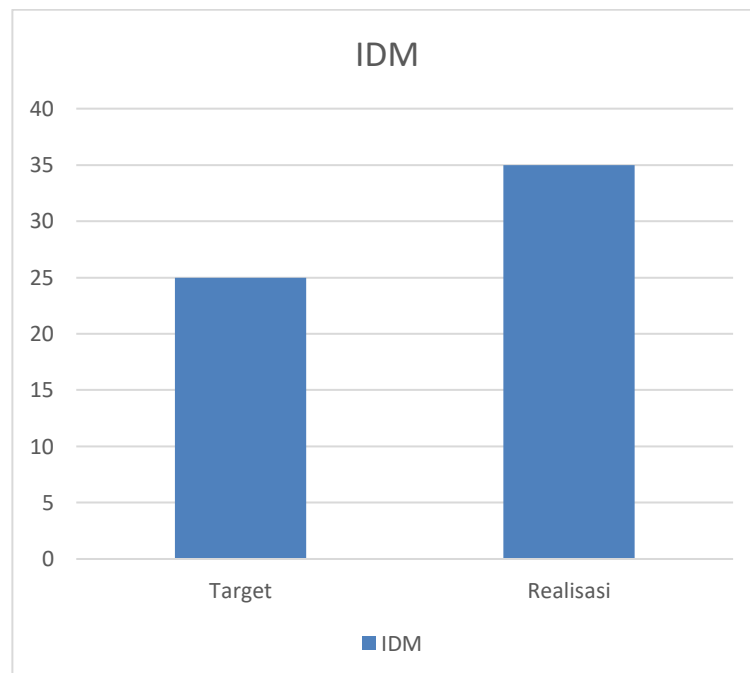
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 111,93% dari target jangka menengah.

Grafik 3.18
Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja telah mencapai 100% dari target jangka menengah.

Grafik 3.19
Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah



Dari grafik serta tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai rata – rata Indeks desa membangun pada Desa se – Kecamatan Prambon telah tercapai 140% dari target jangka menengah.

4. Perbandingan antara capaian kinerja dengan instansi sejenis

Tabel 3.11
Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran dengan instansi sejenis

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Instansi Sejenis	Capaian (%)
1	Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	88,43	88,05	100,43%
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan	35%	10%	350%

Grafik 3.20
Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran dengan instansi sejenis



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja sasaran SKM apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari OPD Kecamatan Balongbendo, maka capaian kinerja sasaran Kecamatan Prambon lebih baik.

Grafik 3.21

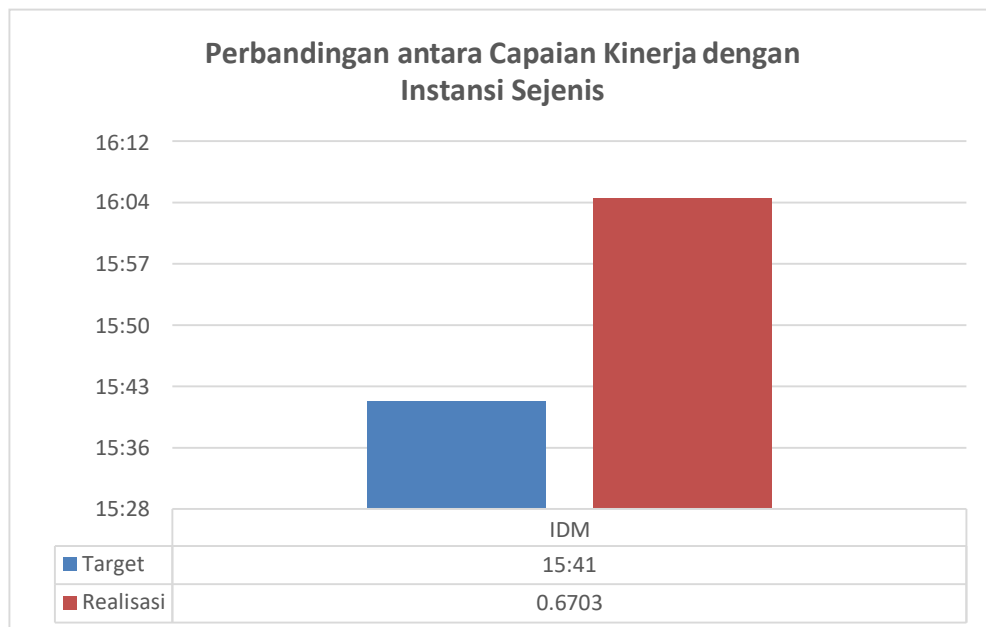
Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran dengan instansi sejenis



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari OPD Kecamatan Balongbendo, maka capaian kinerja sama baik.

Grafik 3.22

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran dengan instansi sejenis



Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari OPD Kecamatan Balongbendo, maka capaian kinerja Kecamatan Prambon lebih baik.

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pengukuran Keberhasilan Kinerja Jangka Menengah OPD

Tabel 3.12
Pengukuran Keberhasilan Kinerja Jangka Menengah OPD

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	%Capaian	Kategori	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	111,93%	Sangat Berhasil	Sekretariat
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	101,30%	Sangat Berhasil	Sekretariat
		Nilai rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) Kecamatan Prambon	91,25%	Berhasil	Kasi-Kasi

Keterangan :

NO	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

➤ TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- Pandemi covid menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terhalang, karena pembatasan tatap muka
- Pemahaman staf terhadap tupoksinya belum maksimal.
- Masih banyak staf belum menguasai IT.

2) Upaya Yang Telah Dilakukan :

- Membuat hotline untuk pelayanan online dan menggunakan aplikasi Sipraja
- Membagi pelayanan umum dalam 2 *shift*, yakni untuk pelayanan luring dari jam 08.00 – 13.00 , serta pelayanan daring

- Melaksanakan program, ngartis kecamatan
 - Melakukan pendampingan dari atasan langsung terkait pemahaman tupoksi
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
 - Melakukan pemdampingan operator desa
 - Mengusulkan kepada BKD tentang assesment dan komputer ASN
 - 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
 - Secara Umum, Capaian Kinerja Pelayanan di Kecamatan Prambon telah Tercapai
- **TUJUAN 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**
- 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
 - Kurangnya tenaga (staf) yang berkompeten di masing-masing seksi
 - Kompetensi operator desa masih perlu ditingkatkan.
 - Tingkat kepedulian pemerintah desa dengan kecamatan masih perlu ditingkatkan agar proses pelayanan (permintaan data dan tingkat kehadiran dalam acara) dapat meningkat.
 - 2) Upaya yang telah dilakukan :
 - Melakukan koordinasi dengan BKD untuk pengisian kekurangan tenaga ASN sesuai peta jabatan dan pelatihan kompetensi di masing- masing seksi.
 - Meningkatnya koordinasi dengan desa.
 - Melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkala terhadap operator pemerintah desa.
 - 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
 - Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja internal pemerintahan kecamatan dan desa.
 - Pembinaan aparatur secara berkala
 - 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
 - Secara Umum, Capaian Kinerja indikator tujuan telah terlaksana dengan baik.

Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan OPD

Tabel 3.13
FORMULASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi	Target Angka Kinerja	Realisasi Angka Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	78	88,43	78	88,43	113,37
2	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik x100 % Jumlah seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan	35 x 100 35	35 x100% 35	100%	100%	100%
		Persentase Desa Maju di Kecamatan	Jumlah desa maju x100 % Jumlah seluruh desa yang ada di kecamatan	7 x100 20	7 x100% 20	20%	35%	175%

Tabel 3.14
Pengukuran Keberhasilan Kinerja Tahunan OPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian	Kategori	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	113,37%	Sangat Berhasil	Sekretariat
2	Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	Berhasil	Kasi Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial
		Persentase Desa Maju di Kecamatan	175%	Berhasil	Kasi Perekonomian

Keterangan :

No	% Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan :

- **SASARAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**
- 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
 - Pandemi covid menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terhalang, karena pembatasan tatap muka
 - 2) Upaya Yang Telah Dilakukan :
 - Membuat hotline untuk pelayanan online dan menggunakan aplikasi SIPRAJA

- Membagi pelayanan umum dalam 2 *shift*, yakni untuk pelayanan luring dari jam 08.00 – 13.00 , serta pelayanan daring
 - Melaksanakan program, ngartis kecamatan
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
- Memaksimalkan fungsi kecamatan dalam pembinaan desa dengan cara melakukan pembinaan terhadap perangkat desa oleh kasi pemerintahan maupun kasubag/kasi lain yang membidangi
 - Melakukan pendampingan operator desaKoordinasi kepada desa dalam pengisian kuesioner IDM
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
- Secara Umum, Capaian Kinerja Pelayanan di Kecamatan Prambon telah Tercapai
- SASARAN 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
- Tidak ada kendala yang dihadapi, karena pada tahun anggaran 2020 kepala desa banyak dijabat oleh aparatur Kecamatan Prambon. Hal ini lebih menguntungkan dari sisi koordinasi
- 2) Upaya yang telah dilakukan :
- Memaksimalkan fungsi kecamatan dalam pembinaan desa dengan cara melakukan pembinaan terhadap perangkat desa oleh kasi pemerintahan maupun kasubag/kasi lain yang membidangi
 - Meningkatnya koordinasi dengan desa
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
- Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja internal pemerintahan kecamatan dan desa
 - Pembinaan aparatur secara berkala.
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
- Sedangkan capaian IDM sudah tercapai dengan baik, hanya perlu ditingkatkan lagi agar jumlah desa maju Kecamatan Prambon bertambah

b. Solusi dan Upaya perbaikan di tahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

1. Meningkatkan capaian kinerja output maupun outcome agar kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
2. Meningkatkan keandalan informasi kinerja dari sumber data yang valid
3. Mempertahankan capaian kinerja yang telah melampaui target dan capaian kinerja output maupun outcome lainnya agar kinerja menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya

4.4 Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung

- **SASARAN 1** : Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Pendukung

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur OPD kecamatan terhadap pelayanan kesekretariatan	98%	98%	100%	Berhasil
	Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat masuk keluar yang dikelola	3000	3084	102,8%	Sangat Berhasil
		Jumlah pengelolaan keuangan dan barang yang terbayar	14 Orang	14 Orang	100%	Berhasil
		Jumlah BBM yang disediakan	8000 liter	3663 liter	63,41%	Kurang
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	19 unit	19 unit	100%	Berhasil
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	750 kotak	843 kotak	112,4%	Sangat Berhasil
		Rekening listrik, air telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan	100%	Berhasil
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100%	Berhasil

	Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia	243 buah	154 buah	63,37%	Kurang
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	841 buah	643 buah	76,45%	Cukup
	Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	1825 buah	1391 buah	76,21%	Cukup

		Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	5 orang	5 orang	100%	Berhasil
		Jumlah jam lembur yang terbayar	1768 jam	655 jam	37,04%	Kurang
	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Prosentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	139,66%	139,66%	Sangat Berhasil
	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	19 unit	17 unit	89,47%	Cukup
		Jumlah gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dibangun	1 Paket	1 Paket	100%	Berhasil
	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 unit	19 unit	100%	Berhasil
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	37 unit	45 unit	121,62%	Sangat Berhasil
		Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara	738 M2	400 M2	54,20%	Kurang
	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	7 dok	7 dok	100%	Berhasil
		Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	4 dok	4 dok	100%	Berhasil
	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen monev PD yang disusun	4 dok	4 dok	100%	Berhasil
		Jumlah dokumen laporan kinerja yang	2 lap	2 lap	100%	Berhasil

		disusun				
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang disusun	13 lap	13 lap	100%	Berhasil

Keterangan :

No	% Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Penjelasan :

Untuk sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terealisasi 88,43% dari target yang ditetapkan yaitu 78 % sehingga tercapai capaian kinerja 113,37% namun didalam penyerapan anggaran ada beberapa kegiatan yang anggaran tidak bisa mencapai realisasi anggaran maksimal antara lain kegiatan penyediaan barang/jasa perkantoran dikarenakan sesuai kebutuhan dan karena adanya pandemi covid 19.

SASARAN 2 : Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tingkat Keberhasilan
1	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	a. persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesos, keamanan dan ketertiban	a. 85%	85%	100%	Berhasil

		umum				
		b. prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dokumen : perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	b. 85%	85%	100%	Berhasil
		c. persentase desa yang sudah menyusun dokumen pemutakhiran data IDM secara valid	c. 85%	85%	100%	Berhasil
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	100%	100%	100%	Berhasil
	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan	85%	85%	100%	Berhasil
	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	85%	85%	100%	Berhasil
	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	-	-	-	-
		Prosentase desa yang mengikuti Musrenbang	100%	100%	100%	Berhasil
	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	85%	77,89%	91,63%	Berhasil

	Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	85%	85%	100%	Berhasil
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	Prosentase monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya	85%	85%	100%	Berhasil
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan	Prosentase monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya	85%	85%	100%	Berhasil
	Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	0	0	0	
		Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba seksi tramtibum	0	0	0	0
	Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan IMB usaha mikro dan IMB rumah tinggal	Prosentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran teknis	-	0	0	0
		Prosentase permohonan IMB Rumah Tinggal 1 lantai luasan maksimal 400 m2 yang telah diberi saran teknis	100%	86,81%	86,81%	Berhasil
	Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan SIUP, TDP usaha mikro	Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan	100%	45%	45%	Kurang
		Prosentase TDP usaha mikro yang diterbitkan	100%	45%	45%	Kurang
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perbup, pengawasan dan penertiban usaha,	Prosentase temuan pelanggaran perda yang ditangani	100%	66,66%	66,66%	Cukup
		Prosentase temuan konflik sosial yang ditangani	100%	0	0	

	penanganan konflik sosial					
	Pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	100%	100%	100%	Berhasil
		Jumlah kader lingkungan hidup	- orang	-		
	Pembinaan perangkat desa	Prosentase desa yang telah Mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100%	100%	100%	Berhasil
		Prosentase desa yang mempunyai SDM berkompeten dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan	90%	80%	94,11%	Berhasil
	Pembinaan usaha Ekonomi masyarakat dan pedagang kaki lima	Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan	85%	-	-	
		Prosentase pedagang kaki lima yan telah mengikuti pembinaan	-	-	-	
	Pembinaan lembaga dan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan	Prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan	85%	85%	100%	Berhasil

Keterangan :

No	% Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Penjelasan:

Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan sebagai penunjang dari sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah terlaksana dengan kategori berhasil. Namun karena pandemi COVID 19 ada kegiatan yang tidak terlaksana seperti upacara peringatan HUT RI 2020.

3.5 Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Per Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	1. Penyediaan barang/jasa perkantoran	771,961,940.00	591,313,475.00	76.60
		2. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	135,420,535.00	76,769,000.00	56.69
		3. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	479,589,500.00	445,395,213.00	92.87
		4. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	341,258,000.00	303,197,899.00	88.85
		6. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	6,620,900.00	5,242,025.00	79.17
		7. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	6,606,900.00	5,853,740.00	88.60
		8. Penyusunan laporan keuangan	5,269,400.00	4,125,245.00	78.29

6	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	27,000,000.00	16,380,000.00	60.67
		2. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	1,125,000.00	1,050,000.00	93.33
		3. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	8,100,000.00	6,720,000.00	82.96
		4. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan	12,385,400.00	9,436,500.00	76.19
		5. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan	14,875,000.00	13,228,000.00	88.93
		6. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian	3,900,000.00	3,360,000.00	86.15
		7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan sosial, agama, dan kemasyarakatan	1,800,000.00	1,680,000.00	93.33
		8. Monitoring, evaluasi dan	10,035,600.00	10,035,600.00	100 %

		pelaporan bidang pemerintahan			
		9. Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	11,839,860.00	2,525,000.00	21.33
		10. Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan IMB usaha mikro dan IMB rumah tinggal	3,435,000.00	3,306,000.00	96.24
		11. Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan SIUP, TDP usaha mikro	2,890,000.00	2,764,000.00	95.64
		12. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan perbup, pengawasan dan penertiban usaha, penanganan konflik sosial	202,435,400.00	180,215,584.00	89.02
		13. Pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	149,611,200.00	145,946,722.00	97.55
		14. Pembinaan perangkat desa	6,925,000.00	6,325,000.00	91.34
		15. Pembinaan usaha ekonomi masyarakat dan pedagang kaki lima	7,156,000.00	0.00	0.00
		16. Pembinaan lembaga dan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan	131,980,000.00	117,057,000.00	88.69

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.16
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	78%	88,43%	113,37%	1.746.727.175	1.431.896.597	81,98%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%	595.493.460	520.029.406	87,33%
	Persentase Desa Maju di Kecamatan	20%	35%	175%			

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efektifitas dan Efisiensi

Tabel 3.18
Efektifitas dan Efisiensi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	113,45%	87,36%	26,09%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dilaksanakan dengan baik	100%	79,43%	20,57%
	b. Persentase Desa Maju di Kecamatan	175%		

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Berdasarkan pengukuran efektifitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat 1 indikator kinerja yang efektif tercapai 100% dan 1 indikator kinerja yang efisien dalam penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut disebabkan karena harga pasar dengan standart harga lebih kecil dibandingkan dengan standart harga (e-rego),
- SASARAN 2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa 3 indikator kinerja tercapai dengan nilai 100 % - 113,45% dan ketiganya juga efisien dalam penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut disebabkan oleh penghematan pada beberapa anggaran yang tidak bisa dilaksanakan, mengingat adanya pembatasan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, seperti upacara peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75.

BAB IV

PENUTUP / SIMPULAN UMUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Prambon Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun. Selain itu LAKIP juga sebagai media penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan sekaligus LAKIP ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa jauh prestasi keberhasilan yang diraih, sehingga dapat membantu stakeholders yang ada dalam pengambilan keputusan serta untuk keperluan lain dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2020 Kecamatan Prambon menetapkan 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja utama. Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan, untuk sasaran 1 tercapai 113,37%, sedangkan untuk sasaran 2.1 tercapai 100% dan sasaran 2.2 tercapai 175% yang artinya dari hasil pengukuran dan evaluasi secara umum sasaran 1 dan sasaran 2.2 telah melebihi target dari yang telah diperjanjikan. Sedangkan untuk anggaran 2020 untuk pelaksanaan dan kegiatan pada Kecamatan Prambon dalam pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 1.746.727.175 dengan realisasi sebesar Rp. 1.431.896.597 atau dengan serapan anggaran 81,98%, berdasarkan hal tersebut diartikan bahwa dalam perencanaan Kecamatan Prambon sudah cukup optimal. Meskipun ada beberapa kegiatan penting yang batal dilaksanakan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Prambon untuk Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang secara otomatis merupakan kesatuan dari pencapaian terhadap visi dan misi Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan.

CAMAT PRAMBON



RONNY YULIANOWARSO, AP. M. HP

Pembina Tk. I

NIP. 19750709 199501 1 001

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN KECAMATAN PRAMBON TAHUN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, Maret 2021

FORMULIR CHECK LIST REVIU

NO		PERNYATAAN	CHECK LIST		DATA PENDUKUNG
			YA	TIDAK	
I	Format	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP			
		LKj telah menyajikan informasi target kinerja			
		LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai			
		LKj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan			
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan (M)			
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan			
II	Mekanisme	Lkj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu			
		Informasi yang disampaikan dalam Lkj yang didukung dengan tata yang memadai			
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit ke unit penyusun Lkj			
		Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja			
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Lkj telah diyakini keandalannya (M)			
		Analisa/penjelasan dalam Lkj telah diketahui oleh unit kerja terkait			
		Lkj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya (M)			
III	Substansi	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja			
		Tujuan/sasaran dalam Lkj telah selaras dengan rencana strategis			
		Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai			